

BAB 2

KAJIAN TEORI

2.1. Pendahuluan

Pada Bab II ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema kajian yang serupa dengan penelitian ini. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu ditujukan untuk mencari tahu ada atau tidaknya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini. Sehingga dengan perbedaan ini, menghasilkan sebuah keaslian penelitian. Keaslian penelitian sangat dibutuhkan agar penulis terhindar dari adanya anggapan tindakan plagiat. Dan juga penulis akan menjabarkan kajian teoritis yang akan digunakan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini akan menggunakan teori diplomasi publik dan politik luar negeri untuk memperdalam deklarasi yang telah dibuat oleh dua negara Korea.

2.2. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai deklarasi Panmunjom bukanlah penelitian yang baru. Penulis melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu, sehingga mendapatkan beberapa judul penelitian yang juga mengkaji mengenai deklarasi Panmunjom yang diselenggarakan pada tahun 2018. Untuk menyempurnakan penelitian penulis, maka dari itu penulis merujuk kepada berbagai sumber yakni berhubungan dengan sejarah Korea, pemerintahan Moon Jae-In, serta deklarasi yang telah dibuat untuk menyatukan kembali Korea Selatan dan Korea Utara.

Penelitian pertama yang penulis gunakan yaitu Deklarasi Panmunjom Dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong Un oleh Indriana Kartini (2018). Menurut Indriana terdapat beberapa persamaan diantara Pertemuan Tingkat Tinggi Panmunjom dengan Pertemuan Tingkat Tinggi sebelumnya di tahun 2000 dan 2007 sehingga memunculkan sikap skeptis akan implikasi Deklarasi Panmunjom bagi perdamaian Korea. Namun komitmen dua negara untuk terus melakukan dialog merupakan hal yang patut dipertahankan. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara masih memiliki keinginan untuk menciptakan rezim perdamaian, meskipun untuk mewujudkan hal tersebut masih ada campur tangan dari negara sekutu masing-masing pihak yaitu Amerika Serikat dan Cina. Perdamaian di Semenanjung Korea akan terwujud melalui kesepakatan empat pihak, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, dan Cina.

Rujukan penelitian yang kedua yaitu Keperluan Korea Selatan Dalam Deklarasi Panmunjom pada saat pemerintahan Moon Jae-In oleh Annisa Arjlia (2019). Dalam penelitiannya Annisa menyebutkan bahwa kepentingan Korea Selatan terhadap terwujudnya Deklarasi Panmunjom pada masa pemerintahan Moon Jae-In Adalah untuk melaksanakan perdamaian, kemakmuran di wilayah Semenanjung Korea dan juga bebas dari ancaman nuklir. Tentu saja itu akan memperoleh beraneka macam profit untuk Korea Selatan, yaitu memajukan anggaran paman modal global di Korea Selatan serta memberikan rasa aman kepada para pengunjung dari berbagai belahan dunia yang sedang mengunjungi Korea Selatan. Deklarasi Panmunjom juga berdampak pada kemakmuran dua negara tersebut.

Rujukan penelitian yang ketiga yaitu Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae-In: Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea oleh Nadia Syafira (2021). Menurut Nadia, kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa Pemerintahan Moon Jae-In cenderung lebih mendukung berhubungan berdampingan secara damai dengan Korea Utara daripada reunifikasi dua negara Korea. Menggunakan analisis *Rational Choice Theory*, Nadia menjelaskan bahwa Moon Jae-In sebagai seorang aktor rasional yang akan memilih pilihan terbaik diantara pilihan lain dalam membuat peraturan negaranya untuk meminimalisir kerugian/konflik yang mungkin terjadi di masa depan. Maka dari itu, dengan teori ini dalam pemimpin suatu negara dituntut untuk menentukan mana yang terbaik, suatu negara dapat melakukannya dengan mempertibangkan segala konsekuensi dari keputusan tersebut.

Lalu rujukan penelitian yang terakhir yaitu *Peace Leadership and the New Economic Initiative of the Korean Peninsula: Focusion on Exchanges and Cooperation between South and North in the Moon Jae-In government* oleh Yang Young-Mo (2019), membahas mengenai bagaimana dampak dari Deklarasi Panmunjom dan *Pyeongyang Joint Declaration* untuk kedamaian dua negara Korea dalam bidang Ekonomi. Dan bagaimana pemerintahan presiden Moon Jae-In menjalankan hal tersebut dengan tantangan menghadapi Korea Utara.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Kebijakan Politik Luar Negeri

Tujuan dari kebijakan kebijakan luar negeri adalah proses dimana tujuan suatu negara disusun. Tujuan tersebut dapat dipengaruhi oleh target yang dilihat

dari masa lalu, aspirasi untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Tujuan kebijakan politik luar negeri dibagi menjadi beberapa tujuan. Tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan. (James N. Rosenau, 1969). Adapun menurut Thomas Diez, kebijakan politik luar negeri merupakan kebijakan dari suatu negara yang diarahkan ke aktor-aktor eksternal dan khususnya negara lain. Dalam pokok bahasan politik luar negeri, biasanya mengkaji tentang model analisis atau perspektif politik luar negeri. Graham Allison (Tulasi R. Kafle, 2011), membagi tiga model analisis politik luar negeri, yaitu:

1. Model aktor rasional (rational actor model);
2. Model perilaku organisasional (organizational behaviour model); dan
3. Model politik pemerintahan (governmental politics model)

2.3.2. Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional atau *national interest* merupakan konsep yang paling umum yang juga menjadi kebutuhan sangat vital bagi satu negara untuk membahas hubungan luar negeri antar negara. Teori ini merupakan alat untuk mendeskripsikan perilaku sebuah negara dalam interaksinya di dunia internasional.

Menurut Scott Burchill kebutuhan nasional adalah tekad suatu Negara dalam melaksanakan strategi politik luar negerinya. Sementara itu menurut Charles Bread, kebutuhan nasional adalah alasan Negara mengatas dasarkan wujud dan tekadnya dalam menjalankan hubungan internasional. Intinya, para penstudi

menggunakan aturan kebutuhan nasional ini untuk mewujudkan dan mengkaji pijakan, tekad, atau validasi utama yang menjadi ideologi suatu Negara untuk berperilaku atau bertindak dalam relasi dengan Negara lain (U.S Bakry, 2017).

Menurut Hans. J Morgenthau, kebutuhan nasional setiap negara adalah mengikuti kekuatan yaitu apa saja yang bisa membangun dan menegakkan pengendalian suatu Negara atas Negara lain. (Mochtar Mas'oed, 1990). Morgenthau juga membagi kebutuhan nasional ke dalam dua tingkat, yaitu kebutuhan nasional primer (vital) dan kebutuhan nasional sekunder. Kebutuhan nasional primer ini terkait dengan perlindungan terhadap identitas fisik, politik, dan budaya serta keamanan dan keberlangsungan hidup suatu negara. Dalam mencapai kebutuhan negara dari kedua tingkatan tersebut yaitu yang pertama kebutuhan vital ini bahkan sebuah negara berani mengambil resiko untuk berperang. Sedangkan kepentingan sekunder adalah kepentingan yang masih dapat dinegosiasikan dengan Negara lain (U.S Bakry, 2017)

Korea Selatan dan Korea Utara menyebut dirinya sebagai negara yang berbeda, kedua negara Korea ini mempunyai sudut pandang reunifikasi yang jauh sangat berbeda. Korea Utara mempunyai pendapat bahwa reunifikasi bisa dicapai lewat nasionalisme Korea, karena menurut Korea Utara adanya campur tangan Amerika Serikat dan Jepang dengan Republik Korea dianggap sebagai bentuk penjajahan. Karena pandangan tersebut, Korea Utara berupaya untuk melakukan nasionalisme di Republik Korea dengan melewati garis paralel 38 pada tahun 1950, yang kemudian menjadi awal dari Perang Korea terjadi (Robinson, 2007). Perang Korea yang terjadi pada awal tahun 1950 lalu , yang kemudian berakhir pada tahun

1953, melalui pembentukan perjanjian gencatan senjata yang kemudian membentuk zona demiliterisasi yang menjadi zona pertahanan dan bersinggungan dengan garis paralel 38.

2.3.3. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/*Inter-Korean Summit*

Inter-Summit atau yang biasa disebut Konferensi Tingkat Tinggi adalah salah satu jenis bentuk kerjasama pertemuan tertinggi yang biasanya dihadiri oleh pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Konferensi Tingkat Tinggi ini diadakan untuk membicarakan upaya diplomatik atau meredakan konflik antar negara. Konferensi Tingkat Tinggi ini biasanya akan disorot besar-besaran oleh media nasional maupun internasional dengan pengamanan yang sangat ketat.

Inter-Korean Summit atau yang dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea merupakan salah satu bentuk kerjasama pertemuan tertinggi yang dihadiri oleh kedua pemimpin pemerintahan Korea Selatan dan Korea Utara. Sebelum diadakannya KTT pada tahun 2018 di Panmunjeom, terdapat pertemuan tingkat tinggi yang telah dilaksanakan, yaitu KTT tahun 2000 dan KTT tahun 2007. Dalam KTT tersebut, yang biasanya dibahas meliputi pengakhiran perang antar-Korea tahun 1953 secara resmi, permasalahan ekonomi, kerjasama ekonomi, kerja sama dalam bidang sosial-budaya, masalah HAM, penempatan angkatan bersenjata di zona bebas militer, dan masalah isu nuklir yang didominasi oleh Korea Utara.

1. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea Tahun 2000

Pada Pidato pelantikannya sebagai Presiden Korea Selatan 25 Februari 1998, Kim Dae Jung pertama kalinya mengungkapkan bahwa beliau ingin mengadakan

Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pada tahun 2000. Dalam kunjungannya ke Jerman pada bulan 2000, melalui Deklarasi Berlin Kim Dae Jung menyerukan kepada Pihak Korea Utara untuk mulai kembali dialog bersama Korea Selatan. Berlin dijadikan tempat yang tepat untuk mengungkapkan Deklarasi Berlin karena Kota Berlin pernah terpecah akibat perbedaan ideologi. Diharapkan Deklarasi Berlin dapat menjadi acuan bagi Korea Selatan dan Korea Utara untuk menciptakan Semenanjung Korea yang makmur, damai, dan aman di masa mendatang (Dessy Fathimatuzzahra, 2013).

Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea atau *Inter- Korean Summit* pada Tahun 2000 diadakan di Pyongyang pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2000. Dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh 2 pemimpin dua negara Korea, yaitu pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il dengan presiden Korea Selatan yang menjabat saat itu Kim Dae-Jung. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pada tahun 2000 ini adalah pertemuan pertama antar pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara semenjak gencatan senjata perang Korea yang terjadi pada tahun 1950-1953.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi tersebut, ada beberapa hasil dan dicantumkan sebagai Deklarasi Bersama 15 Juni. Berikut kesepakatan dalam Deklarasi Bersama 15 Juni:

1. Penuntasan masalah unifikasi nasional secara mandiri.
2. Menuju unifikasi nasional berdasarkan sistem konfederasi (Korea Selatan) dan sistem federasi (Korea Utara)

3. Penuntasan masalah kemanusiaan (pertukaran rombongan keluarga secara terpisah dan tahanan yang tidak diubah ideologinya).
4. Pengaktifan pertukaran ekonomi dan peningkatan rasa saling percaya
5. Pembukaan dialog instansi untuk melaksanakan kesepakatan.

Tabel 2.1 Isi Deklarasi Bersama 15 Juni 2000:

Hasil-hasil setelah Deklarasi Bersama 15 Juni	Penjelasan hasil Deklarasi
Masalah keluarga terpisah	<ul style="list-style-type: none"> - Reuni keluarga terpisah antar Korea. - Pembukaan tempat reuni bagi keluarga terpisah (masih menghadapi hambatan)
Perwujudan hubungan kerjasama ekonomi antar Korea	<ul style="list-style-type: none"> - Proyek kompleks Industri Korea Selatan di kota Gaesong Korea Utara. - Proyek penyambungan rel kereta api jalur Kyonggeui dan Donghae dan jalan darat antar Korea. - Proyek hubungan kerjasama industri ringan dan sumber daya alam antar Korea.
Dialog langsung antar Korea	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan tingkat menteri (mengadakan 21 kali pertemuan secara rutin hingga awal Juni 2007). - Komisi Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Ekonomi antar Korea

	<p>(membahas dan melaksanakan berbagai proyek ekonomi antar Korea secara nyata).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan militer (Pertemuan militer tingkat kerja, pertemuan militer tingkat perwira tinggi, dan pertemuan menteri pertahanan selama ini berhasil meningkatkan rasa saling percaya).
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(sumber:http://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2000.htm?lang=i)

2. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea tahun 2007

Pada Konferensi Tingkat Tinggi pada tahun 2007, konferensi ini dilaksanakan kembali pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2007 di kota Pyongyang, Korea Utara. Pada pertemuan kali ini kembali dihadiri oleh dua pemimpin Korea yaitu presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il. Konferensi ini merupakan Konferensi Tingkat Tinggi kedua antar-Korea setelah Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pertama pada tahun 2000.

Namun, perjalanan menuju KTT antar-Korea yang kedua kali ini berlangsung dengan tidak lancar. Pertemuan puncak antara presiden Roh Moo-hyun dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il, yang sedari awal dijadwalkan pada akhir Agustus, jadwal itu harus ditunda lebih dari satu bulan dikarenakan Korea Utara banjir besar yang melanda akibat hujan deras pada awal Agustus. KTT antar-Korea kedua kali ini akhirnya diadakan kembali setelah tahun ketujuh pertemuan puncak

antar-Korea yang bermula pada tahun 2000. KTT antar-Korea 2007 diakhiri pengumuman Pernyataan Bersama 4 Oktober. Deklarasi Bersama 4 Oktober 2007 terdiri dari 8 pasal,

Tabel 2.2 Isi Deklarasi 4 Oktober 2007

Isi Deklarasi	Penjelasan isi Deklarasi
Implementasi Deklarasi bersama 15 Juni 2000	<ul style="list-style-type: none"> - Penuntasan masalah unifikasi secara independen. - Implementasi dan peringatan Deklarasi Bersama 15 Juni 2000.
Hubungan antar-Korea yang saling hormat dan percaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain. - Melakukan perubahan Undang-Undang dan sistem kebijakan dalam rangka mengembangkan hubungan antar-Korea berorientasi pada unifikasi. - Promosi dialog di berbagai bidang termasuk parlemen.
Peredaan ketegangan militer	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama erat untuk mengakhiri permusuhan militer, meredakan ketegangan, dan menjamin perdamaian di Semenanjung Korea. - Menolak perang apapun di Semenanjung dan menaati perjanjian non-agreesi. - Mengadakan pertemuan menteri pertahanan antar-Korea di Pyongyang pada bulan November guna

	<p>membahas masalah pembangunan kepercayaan militer untuk mewujudkan tujuan itu.</p>
<p>Pengakhiran gencatan senjata dan pembangunan perdamaian secara permanen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pertemuan 3 atau 4 pemimpin negara yang terlibat dalam masalah semenanjung untuk mendeklarasikan berakhirnya Perang Korea. - Berupaya untuk memperlancar implementasi “Pernyataan Bersama 18 September” dan “Persetujuan 13 Februari” guna menuntaskan masalah nuklir di Semenanjung Korea.
<p>Kerjasama ekonomi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan investasi, pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam, serta memberikan syarat prioritas dan lebih banyak keuntungan dalam proyek. - Penetapan ‘zona perdamaian dan kerjasama khusus di Laut Barat’ di daerah Haeju dan sekitarnya, pembentukan zona penangkapan ikan bersama, pembangunan Zona Ekonomi Khusus, penggunaan Pelabuhan Haeju, pembukaan jalur pelayaran langsung melalui Haeju serta penggunaan bersama muara sungai Han. - Peluncuran proyek pembangunan tahap kedua Taman Industri Gaesung.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan layanan kereta barang antara Munsan dan Bongdong. - Penyelesaian berbagai Tindakan institusional, termasuk hal-hal yang terkait urusan imigrasi, komunikasi, dan prosedur bea cukai. - Pembahasan perbaikan jalur rel antara Gaesong-Shineuiju dan jalan raya Gaesong-Pyongyang untuk penggunaan bersama jalur tersebut. - Pembangunan kompleks kerjasama galangan kapal di Anbyeon dan Nampo. - Melanjutkan proyek kerjasama di bidang pertanian, kesehatan, dan jasa medis serta perlindungan lingkungan hidup. - Mengangkat status 'Komite Pelaksana Kerjasama Ekonomi antar-Korea' yang telah ada dengan 'Komite Bersama untuk Kerjasama Ekonomi antar-Korea yang dipimpin oleh pejabat tingkat Wakil Perdana Menteri.
<p>Pertukaran dan kerjasama di sektor sosial dan budaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pertukaran dan kerjasama di bidang sosial-budaya yang mencakup sejarah, bahasa, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan olahraga. - Melakukan program pariwisata gunung Baekdu dan pembukaan layanan penerbangan langsung antara Seoul dan gunung Baekdu untuk tujuan wisata itu.

	- Pengiriman supporter bersama ke Olimpiade Beijing 2008 lewat jalur kereta Gyeongui.
Kerjasama kemanusiaan	- Peningkatan reuni anggota keluarga terpisah dan sanak saudaranya serta mempromosikan pertukaran pesan lewat video (korespondensi video) antar-Korea. - Menempatkan perwakilan masing-masing di pusat reuni permanen di gunung Geumgang dan mengadakan reuni secara teratur. - Kerjasama secara aktif dalam keadaan darurat termasuk bencana alam.
Peningkatan kerjasama di panggung Internasional	- Kerjasama untuk mempromosikan keharuman bangsa Korea, dan hak warga Korea di luar negeri.

(sumber:https://world.kbs.co.kr/special/northkorea/contents/archives/summit/summit_2007.htm?lang=i)

3. Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea/*Inter-Korean Summit 2018*

Setelah satu dekade berlalu, pada masa pemerintahan presiden Moon Jae-In diadakan kembali Konferensi Tingkat Tinggi antar-Korea pada 27 April tahun 2018. Peristiwa ini merupakan salah satu momentum yang bersejarah untuk mewujudkan aspirasi dari rakyat Korea untuk terciptanya perdamaian, kesejahteraan, dan unifikasi Korea Selatan dan Korea Utara. Dimana kedua pemimpin mendeklarasikan dihadapan 80 juta rakyat Korea dan dunia Internasional bahwa tidak akan ada perang di Semenanjung Korea sekaligus menegaskan bahwa peristiwa penting ini menandai era baru perdamaian Korea.

Pertemuan presiden Korea Selatan Moon Jae-In dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un pada Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea 2018 ini adalah pertemuan ketiga antara pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara dalam kurun waktu sebelas tahun. Pertemuan pertama kali terjadi di Konferensi Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2000 yang dihadiri oleh presiden Korea Selatan yang menjabat waktu itu, Kim Daejung dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Il. Lalu konferensi kedua belah pihak pada saat acara Pertemuan Tingkat Tinggi Antar-Korea tahun 2007, didatangkan oleh Presiden Roh Moo Hyun dan Presiden Korea Utara yang pada waktu itu pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Kim Jong Il.

1.4. Keaslian Penelitian

Jika dilihat dari penelitian-penelitian (jurnal/skripsi) sebelumnya, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian pertama yang ditulis oleh Indriana Kartini (2018), Indriana menganalisis tentang Deklarasi Panmunjom dan Prospek Perdamaian Korea di Era Moon Jae-In dan Kim Jong Un. Dalam penelitian kedua, Annisa Arjlia (2019) menganalisis tentang Deklarasi Panmunjom Pada periode kepemimpinan Presiden Moon Jae-In. Menurut Annisa, ada beberapa keuntungan yang sudah diperoleh dari Korea Selatan dalam melaksanakan Deklarasi Panmunjom. Penelitian ketiga yang ditulis Oleh Nadia Syafira (2021) membahas mengenai Analisis Kebijakan Korea Selatan Pada Masa Pemerintahan Moon Jae-In: Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea. Dalam analisis ini, Nadia menggunakan teori Aktor Rasional (*Rational Choice Theory*) yang dimana Presiden Moon Jae-In mendukung Koeksistensi di Semanjung Korea daripada Reunifikasi. Lalu penelitian terakhir

oleh Yang Young-Mo yang berjudul *Peace Leadership and the New Economic Initiative of the Korean Peninsula: Focusion on Exchanges and Cooperation between South and North in the Moon Jae-In government* (2019), membahas mengenai hubungan Ekonomi Korea Selatan dan Korea Utara sesudah diumumkan Deklarasi Panmunjom & *Pyeongyang Joint Declaration*. Dalam menganalisis data, penulis menemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu pada membahas tentang Deklarasi Panmunjom dan upaya Korea Selatan dan Korea Utara dalam melaksanakan isi dari deklarasi tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian-penelitian terdahulu ialah teori yang digunakan dalam menganalisis implementasi Deklarasi Panmunjom oleh Korea Selatan pada masa pemerintahan presiden Moon Jae-In.

